

PENDAMPINGAN 25 INDIKATOR PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN FLORES TIMUR, PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Intje Picauly^{1*}, Deviarbi S. Tira², Bonavantura Taco³, Robertha Kartini⁴, Bernadina Tena⁵

¹⁻²Program Studi Kesehatan Masyarakat, FKM Undana, Kupang NTT

³Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Propinsi NTT

⁴Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Propinsi NTT

⁵Dinas Kesehatan, Propinsi NTT

*Email Penulis : intjepicauly@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Hasil pencatatan aplikasi elektronik pelaporan gizi berbasis Masyarakat periode tahun 2021 melaporkan bahwa kasus stunting pada anak di Kabupaten Flores Timur mengalami penurunan dari 22,7 persen pada tahun 2020 menjadi 20,9% di tahun 2021. Walaupun mengalami penurunan, angka ini masih sangat mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan *cut of point* prevalensi stunting di Indonesia dan badan kesehatan dunia (WHO) yaitu kurang dari 20%. Hasil review kinerja oleh Tim Pokja Stunting Propinsi NTT pada bulan April 2020 menunjukkan bahwa kinerja Kabupaten Flores Timur masih belum memuaskan. Hasil ini didukung dengan rekomendasi uji petik proses Indepth Interview pada sampel keluarga 1000 HPK yang dilakukan pada bulan Nopember 2021 diketahui bahwa program pemerintah daerah dan non pemerintah daerah masih banyak yang belum menjawab permasalahan dilapangan. Selain itu, alokasi anggaran serta penentuan lokus dan sasaran setiap program belum sesuai atau belum tepat jika dibandingkan berdasarkan data sebaran stunting dan keluarga 1000 HPK. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan konvergensi di level pemerintah daerah bersama semua stakeholder (pihak non pemerintah/swasta) belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, proses pendampingan kepada pihak pemerintah daerah dan sektor swasta dirasakan perlu untuk dilakukan dengan tujuan melakukan observasi dan mengidentifikasi secara dekat kendala-kendala dilapangan. Adapun metode pendampingan yang dilakukan adalah kombinasi antara metode Observasi, penyuluhan dan simulasi. Hasil yang diperoleh adalah tingkat pemahaman pemerintah daerah dan semua stakeholder terkait tentang stunting, determinan, dampak dan langkah penanggulangan serta pencegahannya sudah baik. Namun, kendala yang dihadapi pada tahun 2021 adalah kondisi pandemic yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap alokasi anggaran dan proses pelayanan kepada masyarakat termasuk keluarga 1000 HPK. Rekomendasi yang diberikan adalah perlu penekanan pada beberapa cakupan intervensi yang masih rendah persentasenya balita kurus yang mendapat PMT, balita diare yang mendapatkan suplementasi zinc, program bina keluarga balita, orang tua yang mengikuti kelas parenting, anak berusia 2-6 tahun yang terdaftar di kelas PAUD, program keluarga yang mendapatkan bantuan PKH, desa yang menerapkan KRPL, dan ibu hamil yang terlibat dalam kelas konseling.

Kata Kunci : Aksi Konvergensi, Percepatan Penurunan, Stunting

ASSISTANCE OF 25 INDICATORS OF THE ACCELERATION OF STUNTING REDUCTION IN TIMUR FLORES DISTRICT, TIMUR NUSA TENGGARA PROVINCE

Intje Picauly^{1*}, Deviarbi S. Tira², Bonavantura Taco³, Robertha Kartini⁴, Bernadina Tena⁵

¹⁻²Public Health Study Program, FKM Undana, Kupang NTT

³Regional Research and Development Planning Agency, NTT⁴Department of Agriculture and Food Security, NTT⁵Department of Health, NTT

*Author Email : intjepicauly@stad.undana.ac.id

ABSTRACT

The results of the recording of the Community-based Nutrition Reporting Electronic Application for the 2021 period reported that stunting cases in children in East Flores Regency decreased from 22.7 percent in 2020 to 20.9% in 2021. Even though this figure has decreased, this figure is still This is very worrying when compared to the cut of point prevalence of stunting in Indonesia and the World Health Organization (WHO) which is less than 20%. The results of the performance review by the Stunting Pokja Team of NTT Province in April 2020 showed that the performance of East Flores Regency was still unsatisfactory. This result is supported by the recommendation of the in-depth interview process on a sample of 1000 HPK families conducted in November 2021. It is known that there are still many local government and non-local government programs that have not answered the problems in the field. In addition, the budget allocation as well as the determination of the locus and target of each program are not appropriate or not appropriate when compared based on data on the distribution of stunting and 1000 HPK families. This means that the implementation of convergence at the local government level with all stakeholders has not gone well. Therefore, the process of mentoring the local government and the private sector is deemed necessary with the aim of observing and closely identifying the obstacles in the field. The mentoring method used is a combination of observation, counseling and simulation methods. After providing assistance to the local government and all relevant stakeholders, they have understood the duties and functions of each in the implementation of convergence. The recommendations given are that it is necessary to emphasize on several intervention coverages whose percentages are still low, namely: underweight toddlers who receive PMT, diarrhea toddlers who receive zinc supplementation, under-five family development programs, parents who take parenting classes, children aged 2-6years enrolled in PAUD classes, family programs that received PKH assistance, villages that implemented KRPL, and pregnant women who were involved in counseling classes.

Keywords: *Convergence Action, Accelerated Decline, Stunting*

PENDAHULUAN

Stunting adalah salah satu indikator penentu kualitas sumberdaya manusia. Hal ini disebabkan karena anak stunting berpotensi mengalami keterlambatan perkembangan otak, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko mengalami serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Pengalaman dan bukti Internasional menunjukkan bahwa stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, sehingga mengakibatkan hilangnya 11 persen GDP (Gross Domestic Products). Bank Dunia (2016) menyatakan bahwa dalam jangka panjang stunting dapat menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 2-3% dari produk domestik bruto (PDB) per tahun. Jika PDB Indonesia sebesar Rp13.000 triliun, diperkirakan potensi kerugian negara akibat stunting dapat mencapai Rp260 triliun-390 triliun per tahun.

Data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi wanita usia subur yang sehat (32,5%) dan sedang hamil (36,8%) mengalami masalah kurang energi kronis (KEK) lebih tinggi dari prevalensi nasional (17,3%). Prevalensi Ibu Hamil yang menderita anemia meningkat dari tahun 2013 (37,1%) meningkat pada tahun 2018 menjadi 48,9%. Cakupan pemberian air susu ibu (ASI) Eksklusif masih rendah 20% dibawah cakupan nasional 37,3%. Cakupan balita yang mendapat imunisasi lengkap sebesar 50% lebih rendah dari cakupan nasional (60%). Dan cakupan keragaman konsumsi pangan di NTT masih rendah (20%) dibanding cakupan nasional (46,6%). Latar belakang semua data ini mendukung suatu realitas tingginya prevalensi balita stunting di NTT (42,6%) dari prevalensi nasional (30,8%). Hal ini menyimpulkan bahwa masalah kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu faktor risiko terjadinya kejadian stunting di NTT. Pada tahun 2019-2021, seluruh wilayah (21 kabupaten) di NTT tercatat menjadi wilayah fokus penurunan prevalensi stunting termasuk Kabupaten Flores Timur. Namun, penurunan tersebut masih belum mencapai batasan masalah kemenkes RI dan WHO sebanyak 20%.

Upaya pencegahan stunting harus difokuskan untuk menyelamatkan 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) dengan tidak hanya ditujukan kepada ibu hamil. Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu (Konvergensi) untuk menyoal kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan pencegahan stunting. Tiga puluh persen (30%) penyebab masalah gizi dari sektor kesehatan (spesifik), sedangkan tujuh puluh persen (70%) penyebab masalah gizi dapat diatasi oleh lintas sektor (sensitif).

Kedua upaya ini (sensitif dan spesifik) akan saling menunjang agar tujuan dapat tercapai hanya dengan sistem konvergensi (sama-sama bergerak untuk menyelesaikan satu titik permasalahan yaitu stunting). Program multisektor yang sasarannya fokus pada usia, lokasi atau status ekonomi tertentu cenderung lebih efektif dan memberikan dampak signifikan terhadap sasaran. Oleh karena itu, upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen.

Penyampaian layanan konvergensi membutuhkan keterpaduan dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program/kegiatan pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin (TNP2K, 2018). Namun, kenyataannya belum semua pemerintah daerah memahami konsep konvergensi intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik. Oleh karena itu diperlukan peran pendampingan kepada pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengimplementasikan programnya. Pendampingan merupakan salah satu metode yang efektif untuk memfasilitasi dan penguatan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mempercepat capaian suatu tujuan pembangunan, dalam hal ini penerapan konvergensi yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi masalah stunting.

Kegiatan pengabdian ini secara umum bertujuan untuk mengarahkan seluruh pimpinan daerah, instansi, para ASN, serta stakeholder lain agar : 1). Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang stunting dan dampaknya serta konvergensi dan makna pelaksanaannya; 2). Menyepakati langkah atau tindakan preventive lintas sektoral (Rencana Tindak Lanjut/RTL) dalam penanganan masalah stunting; 3). Memberdayakan peserta deseminasi dalam forum group discusion/FGD antara lain Bupati/Wakil/Sekda; Kadis/Kabid terkait; Bappeda; Kapus; KPM; TP-PKK; Sektor Swasta dalam rencana perumusan program penanganan stunting; 4). Pembinaan data konvergensi aksi konvergensi guna mendukung program penanganan masalah stunting; dan 5). Membantu merumuskan cakupan intervensi yang wajib mendapat perhatian khusus pada tahun 2022.

METODE KEGIATAN PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada Kabupaten Flores Timur (Flotim) dengan melibatkan peserta 31 orang dari Instansi Pemerintah seperti : dinas Kesehatan, dinas PMD, dinas Sosial, dinas P3A, dinas PU/PR, dinas P&K, dinas Peternakan, dinas

Pertanian-Ketahanan Pangan, dinas Perikanan, Infokom, BAPPEDA, KPM, TP-PKK, Kepala Puskesmas, TPG (Tenaga Pendamping Gizi) selama dua (2) hari pelaksanaan yaitu : 7-10 Desember 2021 di Aula Kantor BP4D di Flores Timur, Kabupaten Flotim.



Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah 1). Melakukan Monitoring dan Evaluasi penanganan Stunting yang penekanannya pada 25 indikator penyebab stunting dan pelaksanaan 8 aksi konvergensi di kabupaten Flores Timur_Larantuka; 2). Melakukan Rivieu hasil konvergensi pencegahan penanganan stunting (aksi 1-8) tahun 2020-2021; 3). Pendampingan Persiapan pelaksanaan aksi konvergensi ditahun 2022 dan 4). Merumuskan Rencana kerja tim pokja stunting Kabupaten Flotim tahun 2022.

Kegiatan dilaksanakan pada 7-10 Desember 2021 dan terbagi atas : 1). Tahap observasi dan Indepth ke rumah anak-anak yang teridentifikasi sebagai anak Stunting sebanyak 23 orang anak dan 2). Tahap FGD bersama 31 peserta menggunakan metode **“Pendidikan dan Pelatihan”**. Selanjutnya, Tim Pokja mendeseminasikan



hasil indepth yang telah dianalisis dan dikaji bersama hasil analisis situasi (Aksi I) bersama peserta FGD. Pada tahap ini, semua peserta akan diberikan arahan sekaligus sosialisasi/penyuluhan dan praktek terkait prinsip dasar pelaksanaan aksi konvergensi untuk membantu pihak OPD dan stakeholder terkait agar lebih mampu memilih atau menentukan sendiri program serta mampu



mengevaluasi kinerja masing-masing OPD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Stunting merupakan masalah kesehatan yang cukup berdampak pada kualitas sumberdaya manusia. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan stunting sebagai isu yang mendesak untuk diselesaikan. Pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah menetapkan 160 kabupaten/kota prioritas untuk intervensi stunting dengan mengeluarkan paket kebijakan dan regulasi terkait intervensi stunting. Di samping itu, kementerian/lembaga (K/L) juga sebenarnya telah memiliki program, baik terkait intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif, yang potensial untuk menurunkan stunting. Intervensi Program

Gizi Spesifik dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) melalui Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Intervensi program gizi sensitif dikoordinir oleh kementerian dalam negeri dan Bappenas. Semuanya tersusun rapih dalam satu paket besar yang dikenal dengan sebutan Aksi Konvergensi.

Aksi konvergensi adalah membutuhkan keterpaduan proses mulai dari proses perencanaan sampai pada proses pemantauan atau evaluasi program/kegiatan pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif (terangkum dalam 20 indikator stunting) untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin (TNP2K, 2018). Namun, pelaksanaan aksi konvergensi ini masih diperhadapkan dengan kendala rendahnya pemahaman tentang aksi konvergensi itu sendiri dan masih adanya pemikiran bahwa masalah stunting adalah urusan dinas kesehatan semata. Sehingga, gambaran capaian 20 indikator belum tercapai maksimal. Selama pelatihan, semua peserta diberi penguatan tentang filosofi dan makna kekuatan dari konvergensi (20 indikator) terhadap percepatan penurunan stunting.

Pada umumnya, proses percepatan penurunan stunting melibatkan sejumlah program/kegiatan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sampai desa yang bersifat rutin/tahunan. Namun, di daerah prioritas, seperti Kabupaten Flotim dan kabupaten lainnya tentu memiliki pos anggaran, sehingga daerah-daerah tersebut dapat berinovasi membuat program-program sendiri terkait percepatan penurunan/penanggulangan stunting.

a. Monitoring dan Evaluasi 20 Cakupan Intervensi Program Gizi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menegaskan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian (monitoring) dan Evaluasi



terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Monitoring dan Evaluasi (M&E) yang kemudian disingkat dengan MONEV digunakan untuk mengamati perkembangan dan menilai kinerja organisasi, proyek, program, dan kebijakan yang umumnya dilakukan oleh pemerintah, organisasi internasional, LSM, kelompok masyarakat

sipil, dan organisasi lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tatakelola organisasi, proyek, program, dan kebijakan, serta pembelajaran

atas keluaran, hasil dan dampak tiap-tiap intervensi organisasi, proyek, program, dan kebijakan baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 (2006) menjelaskan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Dengan kata lain pemantauan merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Kegiatan *indepth* kepada keluarga 1000 HPK yang memiliki keterkaitan dengan anak stunting bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait kondisi realisasi 25 cakupan intervensi stunting dengan menggunakan

metode wawancara langsung menggunakan kuesioner dalam aplikasi online “Cobocollect” dengan penentuan sampel menggunakan metode “Purposive Sampling” di Desa Balela Kecamatan Larantuka dan Desa Mudakaputu di Kecamatan Ile Mandiri mewakili wilayah pedesaan dengan jumlah anak stunting sebanyak 23 anak. Berikut adalah hasil



analisis dari proses Indepth Interview dan Hasil analisis situasi kabupaten Flotim.

Rivieu Kabupaten

Hasil Riview untuk Kab. Flotim 2021 berdasarkan sumber data :

1. ANSIT & Prevalensi Stunting 2021 :
88% cakupan Baik (63,6% Hijau & 39,4% Kuning) dgn prevalensi stunting 20,9%
“Stunting kategori Sedang”. Hal ini berarti :

“Hasil Sesuai Proses”

Lanjutan Rivieu Kabupaten

2. INDEPTH & Prevalensi Stunting 2021
63% cakupan baik (50% hijau & 50% kuning)
dgn capaian penurunan prevalensi stunting kategori “Sedang” : $\leq 20\%$).

Hal ini berarti bahwa :

“Hasil Dan Proses Sesuai”

Rekomendasi :

Fokus pada 37% cakupan yg buruk kemudian dievaluasi program dan kegiatan.

Hasil ini menunjukkan bahwa dari 23 responden yang dikunjungi terdapat 88% balita yang berstatus gizi cukup baik. Hal ini bermakna bahwa hasil indept dan hasil ansit pada 20 cakupan nasional bersesuaian.

Contoh per desa menurut cakupan Intervensi

1. Semua desa di Flotim (250 desa) mempunyai kategori Stunting berbeda (Ringan, Sedang, dan Berat) namun persentase cakupan yang baik (hijau) > 80% atau 20 cakupan yang 100%. PERTANYAANnya :
2. Apakah Keistimewaan pada 112 desa yang mempunyai prevalensi stunting tinggi atau kategori stunting berat namun memiliki >80% cakupan Baik (hijau) ???

Contoh kasus :

1. Kecamatan : Tanjung Bunga; Desa : Waibao; Puskesmas : Waiklibang
 2. Prevalensi stunting urutan 7 tertinggi : 41.71%, NAMUN....
- Dari 25 Indikator Nasional/Daerah (Spesifik & Sensitif) terdpt 24 (96%) indikator cakupan yg berwarna Hijau (Menyebar pd Intervensi Sensitif).
- Rekom.: Fokus & terapkan tiga (3) standar (Alat, tenaga, dan metode) dlm rangka validasi data.

Hasil Identifikasi "Cakupan Intervensi" dari sumber Indepth dan Ansit yang perlu diperhatikan ditahun 2022 :
1. Cakupan balita kurus yang mendapatkan PMT
2. Cakupan balita diare yang memperoleh suplementasi zinc
3. Cakupan keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Balita
4. Cakupan orang tua yang mengikuti kelas parenting
5. Cakupan anak usia 2-6 tahun terdaftar (peserta didik) di PAUD
6. Cakupan KPM PKH yang mendapatkan FDS gizi dan kesehatan
7. Cakupan desa menerapkan KRPL
8. Cakupan kelas ibu hamil (ibu mengikuti konseling gizi & kesehatan)



REKOMENDASI

1. Memperkuat Landasan Hukum dalam pelaksanaan konvergensi dari level kabupaten sampai desa
2. Refreshing tenaga gizi dan kader guna meningkatkan kapasitas dilapangan
3. Memperbanyak tenaga gizi dan tenaga trampil lain untuk memperkuat proses pelaksanaan intervensi
4. Mengembangkan inovasi "Gerobak Cinta" ke skala yang lebih luas
5. Perlu adanya keberpihakan dan evaluasi penggunaan anggaran dlm pelaksanaan 25 program intervensi stunting

b. Pendampingan Aksi Konvergensi

Monitoring atau pemantauan merupakan aktivitas untuk mengamati dan/atau mencermati secara berkala dalam penyediaan informasi tentang status perkembangan suatu program/kegiatan, serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan merumuskan tindak lanjut yang dibutuhkan. Sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja organisasi, proyek, program, dan kebijakan yang berkaitan dengan relevansi, efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, dampak, dan koherensi dari tiap-tiap intervensinya.

Proses pendampingan yang dilakukan menurut dasar dari pelaksanaan Monev (Lapangan dan dokumen 8 aksi konvergensi). Pendampingan dimulai dengan penyampaian materi terkait pengertian, batasan konvergensi, fungsi dan tujuan konvergensi kepada semua lintas sektor baik pemerintah daerah maupun non pemerintah daerah di Wilayah Flotim. Setelah mengikuti deseminasi/penyuluhan tersebut peserta

mulai memahami tugas dan tanggungjawab serta tindakan yang harus dilakukan terkait anggaran dan program.

Tabel 1. Hasil **Identifikasi Dan Klarifikasi Aktivitas** di beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)

No	INDIKATOR KEGIATAN	TEMUAN	KLARIFIKASI	KOMITMEN
1	Peran tim penurunan Stunting kabupaten-des	Tidak ada pertemuan berkala tim Pokja kabupaten - desa	Akan dilaksanakan per triwulan	Setuju dibawa monitoring Bappeda
2	Data 20 indikator tidak lengkap	Masih ada OPD yang belum paham tentang stunting dan sistem manajemen data masih lemah (collecting data & analysis data)	Tim Pokja Propinsi melakukan pendampingan dan memperkuat dalam <i>collecting & analysis data</i>	Setuju dibawah monitoring Bappeda
3	Tenaga gizi lapangan	Kader posyandu kewalahan dengan jumlah keluarga 1000 HPK yang banyak dan luasnya jangkauan wilayah kerja	Perekrutan tenaga gizi dan sarjana pendamping desa serta penguatan kapasitas KPM	Setuju dan siap dikerjakan dibawah monitoring Bappeda, PMD, Dinkes
4	Input data EPPBGM dan data 20 Indikator stunting	Tenaga Operator input data ke Bangda Propinsi dan Pusat sering berganti	Perekrutan staf / operator independent	Setuju dibawa monitoring Bappeda dan Dinkes
5	Program Inovatif	Produksi bahan pangan lokal (Sorgum) sebagai sumber energi terbaik	Mempertimbangkan untuk pengolahan PMT paten milik kabupaten Flotim	Setuju melakukan riset kerjasama PT dalam rangka membuat produk PMT Lokal siap saji untuk kelompok beresiko

Tabel. 2. Umpan Balik peserta

No	PERTANYAAN	SIKAP
1	Kami sudah mulai paham tentang stunting, namun kami belum paham betul apa saja yang dapat menyebabkan seorang anak itu bisa menderita stunting	<i>Peserta mengerti dan mengolah informasi dengan baik</i>
2	Data tentang program KRPL/P2L tersedia, namun kami tidak tahu bagaimana cara collecting & analysis data?	<i>Peserta mengerti dan mengolah informasi dengan baik</i>
3	Menurut kami, kejadian stunting itu karena adanya faktor "Genetik" mohon penjelasan ??	<i>Peserta mengerti dan mengolah informasi dengan baik</i>
4	Kami tidak paham tentang cara mengolah pangan dengan baik agar makanan yang dikonsumsi masih mengandung kandungan gizi yang cukup	<i>Peserta mengerti dan mengolah informasi dengan baik</i>

Informasi yang terlampir dalam tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi transformasi informasi yang baik antara peserta dengan penyuluh. Penyuluhan (*extention education*) merupakan upaya untuk mengubah perilaku klien ke arah yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan penyuluhan (pendidikan nonformal) ini diperlukan dalam berbagai kehidupan masyarakat, mulai dari penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, kesehatan, keluarga berencana, hukum, pendidikan, dan aspek penyuluhan lainnya. Dalam perkembangannya, kegiatan

penyuluhan terutama dalam penyuluhan pertanian mengalami berbagai tuntutan perubahan. Hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan oleh Maulana (2007) bahwa penyuluhan kesehatan merupakan kegiatan penambahan pengetahuan yang diperutukkan



bagi masyarakat melalui penyebaran pesan. Tujuan kegiatan penyuluhan kesehatan yaitu untuk mencapai tujuan hidup sehat dengan cara mempengaruhi perilaku masyarakat baik itu secara individu ataupun kelompok dengan menyampaikan pesan.

Picauly (2021) menyatakan bahwa semua aksi konvergensi berpengaruh nyata terhadap tingkat cakupan program intervensi sensitif. Sedangkan variabel aksi konvergensi 1 (analisis situasi) berperan menjadi vaktor prediktor sedangkan aksi 2-8 menjadi vaktor risiko terhadap tingkat cakupan program aksi intervensi gizi sensitif dari lima (5) dinas pemerintahan daerah di wilayah 21 kabupaten Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditjen Bangda KemenDagri RI (2020) juga menyatakan bahwa pembelajaran dari keberhasilan di negara-negara lain menunjukkan bahwa efektifitas penurunan stunting ditentukan oleh seberapa menyeluruh atau terpadunya intervensi gizi yang menyasar lokasi dan kelompok sasaran prioritas. Pembelajaran juga menunjukkan bahwa intervensi gizi paling efektif diberikan pada periode 1000 HPK, sehingga kelompok sasaran prioritas adalah Rumah Tangga 1000 HPK. Untuk memastikan konvergensi intervensi gizi dilaksanakan secara efektif, perlu kejelasan peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, sampai dengan Pemerintah Desa.

PENUTUP

1. Percepatan pecegahan stunting hendaknya dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi program/kegiatan.
2. Indikator penanggulangan stunting (20 indikator) merupakan tolok ukur keberhasilan proses percepatan penanggulangan stunting yang sangat efisien.
3. Layanan dari setiap intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif tersedia dan dapat

diakses bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama rumah tangga 1.000 HPK (ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan).

4. Kegiatan pendampingan merupakan salah satu upaya mendukung kinerja kabupaten dan ikut menjamin keberlangsungan aksi konvergensi.

REKOMENDASI KEGIATAN :

Hal yang harus diperbaiki agar program/kegiatan yang dilakukan bisa lebih efektif menurunkan stunting adalah :

1. Melakukan sistem pendataan secara terpadu (sigizi terpadu) sehingga program/kegiatan yang dilakukan bisa tepat sasaran dan efektif dalam menanggulangi dan menurunkan stunting.
2. Menyediakan aplikasi sistem satu data (bigdata aplication)
3. Menentukan sistem komando konvergensi dilapangan guna menjamin pelaksanaan aksi konvergensi

DAFTAR PUSTAKA

- Black RE, Allen LH, Bhutta ZA, et alfor the Maternal and Child Undernutrition Study Group. Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences. Lancet 2013. Published online Jan 17. DOI: 10.1016/S0140-6736(07)61690-0.
- Badan Litbang Kesehatan. Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013. Bdan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Jakarta
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 2018. Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar 2018. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta
- Elan Satriawan, Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 22 November 2018
- World Bank. 2016. DIGITAL DIVIDENDS.
<file:///C:/Users/USER/Downloads/9781464806711.pdf>
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2017. 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting). Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2018. Panduan Konvergensi Program/Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting. Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta.
- Kemendagri. 2020. Cegah Stunting itu Perlu. Jakarta
- Bappenas RI. 2011. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015.
<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/kegiatan-utama/rencana-aksi-nasional-pangan-dan-gizi-2011-2015/>
- Picauly Intje. 2021. Pengaruh Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting Terhadap Cakupan Program Intervensi Gizi Sensitif Di Propinsi Nusa Tenggara Timur.VOL. 10 NO. 2 (2021): Jurnal Pangan Gizi Dan Kesehatan.

- Pritasari, Kirana.,2018. Upaya Percepatan Penurunan Stunting: Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2018 & Rencana Tindak Lanjut Tahun 2019
Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia, Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan Edisi 1 Semester I Tahun 2018, ISSN 2088-270 X
- Syamsuadi, A. (2017). Membangun Demokrasi Pemerintahan di Riau Dalam Perspektif Budaya Melayu. Jurnal Dinamika Pemerintahan (JDP), 1(1), 1-10.
- Umi Hanik, Heru Subiyantoro (2010). Monitoring & Evaluasi Sebagai Konsensus Untuk Mencapai Efektivitas Pemanfaatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri. Jurnal BPPK Volume 1, Nomor 5, November 2010, Kementerian Keuangan <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk/issue/view/2>
- World Bank. 1996. Designing project monitoring and evaluation (English). IEG lessons and practices. Washington, DC: World Bank. <https://documents.worldbank.org/curated/en/346101468162557825/Designing-project-monitoring-and-evaluation>
<https://web.undp.org/evaluation/documents/handbook/me-handbook.pdf>
- A UNICEF Guide for Monitoring and Evaluation Making a Difference